

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

TUGAS PORTOFOLIO

Dosen pengampu :

Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.

Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., C.A.

Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh:

Kelompok 8

1.Daffa Raihan shofwan Susanto 2213031039

2.Adella Putri Rizkia 2213031044

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI JURUSAN
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
LAMPUNG
2025**

ARTIKEL

1. Identitas Artikel

Judul	:	Mengenal Akuntansi Sektor Publik: Bagaimana Pemerintah Mengelola Uang Rakyat?
Penulis	:	Dr. Yeni Kuntari, S.E., M.Si., Ak., CA, CGAA
Tahun	:	13 Agustus 2024
Media	:	Wimapedia
Website	:	https://share.google/Fjx8nG25jpr7xTWTV

2. Analisis

Artikel ini menjelaskan bagaimana akuntansi sektor publik digunakan pemerintah untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan uang rakyat. Sejak tahun 2000, Indonesia mulai menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang mengadopsi IPSAS agar laporan keuangan lebih lengkap dan akuntabel. Sistem lama hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran, sedangkan standar baru menyediakan laporan yang lebih transparan seperti neraca, laporan surplus-defisit, arus kas, dan realisasi anggaran.

Penulis menekankan bahwa akuntansi sektor publik bersifat kontekstual, artinya dipengaruhi politik, budaya, dan kondisi tiap negara. Indonesia memulai reformasi akuntansi dengan sistem akrual di daerah seperti Sleman dan Semarang, yang membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih terbuka. Tujuan utama dari penerapan standar ini adalah meningkatkan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat mengetahui kekayaan negara, kinerja anggaran, serta bagaimana pemerintah mengelola dana publik.

3. Komentar Kelompok

Menurut kelompok kami, artikel ini sangat informatif dan mudah dipahami, terutama bagi pembaca yang baru mengenal akuntansi sektor publik. Penulis berhasil menjelaskan secara sederhana mengapa reformasi pelaporan keuangan dibutuhkan dan bagaimana standar akuntansi baru meningkatkan transparansi pemerintah.

Namun, artikel ini dapat lebih kuat apabila ditambah contoh nyata praktik laporan keuangan pemerintah saat ini. Meski begitu, artikel ini tetap sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman jelas bahwa akuntansi sektor publik adalah alat penting untuk memastikan dana rakyat dikelola secara jujur dan terbuka.

1. Identitas Artikel

Judul	:	Akuntansi Sektor Publik: Definisi, Tujuan, Jenis, & Prospeknya
Penulis	:	Rahmawati
Reviewer	:	Dwi Winarno, S.E., M.B.A., CIFM
Tahun	:	13 Mei 2025
Media	:	School of Economics and Business Blog
Website	:	https://share.google/CONEOf3FYBZmpk4N2

2. Analisis

Artikel ini menjelaskan akuntansi sektor publik sebagai sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan pemerintah dan organisasi publik untuk memastikan dana masyarakat dikelola secara transparan dan akuntabel. Penulis memaparkan tujuan utama akuntansi sektor publik, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi, perencanaan, dan pelaporan.

Artikel juga menguraikan dua jenis akuntansi sektor publik: akuntansi pemerintah dan akuntansi sosial, serta membandingkannya dengan akuntansi sektor swasta yang berfokus pada profit. Selain itu, artikel menjelaskan karakteristik sektor publik yang nonprofit, berbasis anggaran, mengikuti aturan pemerintah, dan memiliki tuntutan akuntabilitas tinggi.

Penulis memaparkan tujuh jenis laporan keuangan sektor publik seperti LRA, LO, Neraca, Arus Kas, dan CALK. Di bagian akhir, artikel membahas prospek kerja di bidang ini, seperti akuntan, auditor, konsultan pajak, akuntan forensik, dan manajer keuangan, lengkap dengan kisaran gaji dan peluang karier di instansi pemerintah maupun organisasi nirlaba.

3. Komentar Kelompok

Menurut kelompok kami, artikel ini informatif dan mudah dipahami, karena menjelaskan konsep akuntansi sektor publik secara runtut mulai dari definisi hingga peluang karier. Artikel ini juga jelas menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan uang rakyat.

Meskipun demikian, artikel akan lebih kuat jika memberikan contoh kasus nyata penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia. Namun secara keseluruhan, isi artikel sangat bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami dasar-dasar akuntansi sektor publik.

1. Identitas Artikel

Judul	:	Sistem dan Standarisasi Akuntansi Sektor Publik
Penulis	:	adminD3asp
Tahun	:	26 September 2024
Media	:	Website Resmi Program D3 Akuntansi Sektor Publik
Website	:	https://share.google/7iTCq3DsyCsZ3ocwb

2. Analisis

Artikel ini membahas bagaimana sistem akuntansi sektor publik bekerja dan standar internasional yang mengaturnya. Akuntansi sektor publik berfokus pada akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan efektif dana publik. Sistem ini mencatat dan melaporkan seluruh transaksi pemerintah untuk memastikan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Komponen penting yang dibahas meliputi:

- Akuntansi Dana, untuk memisahkan penggunaan dana sesuai tujuan.
- Basis Cash dan Accrual, dengan kecenderungan global menuju akrual yang lebih akurat.
- IFMIS, yaitu sistem informasi keuangan terintegrasi yang meningkatkan akurasi dan pemantauan anggaran.
- Otomatisasi laporan, guna mempercepat pelaporan dan mengurangi kesalahan.

Artikel juga menjelaskan IPSAS sebagai standar internasional pelaporan sektor publik yang bertujuan meningkatkan transparansi, konsistensi, dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Namun penerapannya menghadapi tantangan seperti aturan yang kompleks, kurangnya SDM

terlatih, resistensi perubahan, dan keterbatasan teknologi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik penting untuk memastikan pengelolaan dana rakyat yang bertanggung jawab dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3. Komentar Kelompok

Menurut kelompok kami, artikel ini jelas dan informatif karena menjelaskan sistem akuntansi sektor publik serta pentingnya standar internasional seperti IPSAS dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Artikel ini mudah dipahami dan relevan bagi pembaca yang ingin memahami dasar-dasar akuntansi publik.

Hanya saja, artikel akan lebih kuat jika disertai contoh penerapan nyata di instansi pemerintah. Meski begitu, isi artikel sudah sangat membantu memberi gambaran ringkas mengenai sistem dan standarisasi akuntansi sektor publik.

JURNAL NASIONAL

1. Identitas Jurnal

Judul	:	Akuntansi Sektor public di Indonesia : Kajian Sistematis atas Tranparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
Penulis	:	Prasetyono Hendriarto, Lukman Hakim Sangapan, Atik Budi Paryanti, Adler Haymans Manurung, &Amran Manurung
Nama Jurnal	:	Journal of Government and Institutional Accounting (JGIA)
Volume & Nomor	:	Vol. 3, No. 2
Tahun	:	2025
Halaman	:	90–106
Penerbit	:	Penerbit: Greenation
DOI	:	https://doi.org/10.38035/jgia.v3i2

2. Ringkasan Jurnal

Jurnal ini membahas penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia melalui pendekatan systematic review yang berfokus pada transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian menggabungkan analisis dokumen laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah periode 2018–2023, studi sistem informasi keuangan, serta wawancara mendalam dengan pejabat akuntansi dan auditor internal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Dari 20 instansi yang dianalisis, 65% memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sementara 25% Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 10% Tidak Wajar/TW. Transparansi keuangan pemerintah pusat juga telah mencapai 100% publikasi laporan secara digital, sedangkan pemerintah daerah baru 60%.

Penelitian mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam penerapan akuntansi sektor publik, yakni keterbatasan SDM akuntansi (75%), hambatan infrastruktur sistem informasi (45%), lemahnya budaya transparansi pada sebagian pemerintah daerah, serta belum optimalnya penggunaan e-budgeting dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Penelitian ini juga mengaitkan temuan dengan teori New Public Management dan Institutional Theory, yang menjelaskan bahwa reformasi akuntansi publik sangat dipengaruhi tekanan regulasi, tuntutan legitimasi, dan kesiapan organisasi.

3. Analisis Jurnal

Menurut kelompok kami, jurnal ini sangat informatif karena memberikan gambaran komprehensif tentang akuntansi sektor publik di Indonesia melalui kombinasi systematic review, wawancara, dan observasi, sehingga hasilnya relevan dengan kondisi nyata pengelolaan keuangan pemerintah. Kelebihannya terlihat pada analisis perbedaan transparansi antara pemerintah pusat dan daerah serta pembahasan faktor penentu kualitas pelaporan seperti SDM, teknologi informasi, dan komitmen pimpinan yang didukung teori NPM dan teori institusional. Namun, jurnal ini memiliki keterbatasan karena sampel yang terbatas, kurangnya penjelasan profil narasumber, dan belum adanya pembahasan teknis mengenai digitalisasi keuangan di daerah. Meski demikian, jurnal ini tetap bermanfaat sebagai rujukan

karena menegaskan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga kesiapan SDM, teknologi, dan budaya organisasi.

1. Identitas Jurnal

Judul	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Kota Pekalongan)
Penulis	Fangela Myas Sari, Anni Safitri, & Aria Elshifa
Nama Jurnal	Journal of Social and Policy Issues
Volume & Nomor	Vol. 4, No. 2
Tahun	2024
Halaman	90–106
Penerbit	Pencerah Publishing
DOI	https://doi.org/10.58835/jspi.v4i2.331

2. Ringkasan Jurnal

Jurnal ini meneliti bagaimana penerapan akuntansi sektor publik (ASP) dan kualitas aparatur pemerintah memengaruhi pencegahan fraud laporan keuangan, dengan objek penelitian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekalongan. Fraud masih menjadi permasalahan serius di sektor publik, ditandai dengan berbagai kasus korupsi dan temuan BPK mengenai laporan keuangan yang tidak memenuhi standar.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 61 responden yang merupakan staf OPD bagian akuntansi atau tata usaha keuangan. Teknik sampling menggunakan purposive sampling, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan SmartPLS 3.0 melalui uji validitas, reliabilitas, structural model, R-Square, dan path coefficient.

Hasil penelitian menunjukkan:

- 1) Penerapan Akuntansi Sektor Publik (SAP) berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan fraud (p-value 0,007). Hal ini berarti semakin baik penerapan SAP sesuai PP No.71 Tahun 2010, maka semakin besar kemampuan pemerintah mencegah fraud.
- 2) Kualitas aparatur pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud (p-value 0,008). Aparatur yang kompeten, profesional, dan sesuai latar belakang pendidikan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengurangi risiko fraud.

Penutup jurnal menyatakan bahwa penerapan SAP yang disiplin serta kualitas aparatur yang baik menjadi elemen penting dalam mencegah fraud di instansi pemerintah. Penulis menyarankan penelitian selanjutnya menambah variabel seperti SPI atau profesionalisme pegawai.

3. Analisis Jurnal

Menurut kelompok kami, jurnal ini berkualitas baik karena menggunakan metode kuantitatif dengan SmartPLS yang mampu menjelaskan hubungan variabel secara objektif. Pemilihan variabel penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas aparatur pemerintah relevan dengan isu pencegahan fraud, ditambah objek penelitian di Kota Pekalongan yang memiliki konteks nyata, sehingga memberi nilai praktis dan didukung teori yang kuat. Namun, jurnal ini memiliki keterbatasan berupa jumlah sampel yang kecil, pembahasan kualitas aparatur yang masih umum, serta nilai R-Square 34,2% yang menunjukkan adanya faktor lain belum diteliti. Meski demikian, jurnal ini tetap berkontribusi penting bagi kajian akuntansi sektor publik dan

bermanfaat sebagai dasar evaluasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

1. Identitas Jurnal

Judul	:	Akuntansi Pada Organisasi Sektor Publik
Penulis	:	Siti Qiroatin Nasyfa, Bekti Puji Lestari, & Danish Priyan Saputra
Nama Jurnal	:	Jurnal Bisnis Inovatif dan Digital (JUBID)
Volume & Nomor	:	Vol. 2, No. 3
Tahun	:	2025
Halaman	:	103-113
Penerbit	:	Arimbi Publisher
DOI	:	https://doi.org/10.61132/jubid.v2i3.615

1. Ringkasan Jurnal

Jurnal ini membahas penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia menggunakan pendekatan literature review. Fokus utama penelitian adalah bagaimana akuntansi sektor publik berperan dalam menciptakan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penulis memaparkan bahwa Indonesia telah mengadopsi basis akrual modifikasi sesuai PSAP No. 01 Tahun 2022 sebagai langkah transisi menuju full accrual sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 71 Tahun 2010.

Secara historis, sistem akuntansi pemerintah Indonesia berkembang dari basis kas pada era Orde Baru menjadi sistem yang lebih transparan dan akuntabel pasca Reformasi 1998. Struktur pelaporan di sektor publik juga berbeda dengan sektor swasta karena memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, dan CaLK.

Kesimpulan jurnal menegaskan bahwa akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pembukuan, namun merupakan instrumen penting untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan negara yang lebih baik.

2. Analisis Jurnal

Menurut kelompok kami, jurnal ini menyajikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai perkembangan serta tantangan akuntansi sektor publik di Indonesia. Kekuatan utamanya terletak pada penyajian yang sistematis, mulai dari sejarah, konsep dasar, perbedaan dengan akuntansi swasta, hingga prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan seperti akrual modifikasi, nilai historis, legalitas anggaran, konsistensi, dan materialitas. Selain itu, jurnal ini mampu mengaitkan teori dengan konteks Indonesia dengan baik, termasuk menyoroti kendala implementasi akuntansi akrual yang berkaitan dengan kualitas SDM, budaya birokrasi, dan keterbatasan teknologi informasi, serta memperkaya analisis melalui perbandingan dengan negara lain.

JURNAL INTERNASIONAL

1. Identitas Jurnal

Judul	:	Accountability and Transparency in Public Sector Accounting: A Systematic Review
Penulis	:	Iva Nur Tsalasatin Muslim & Sri Yuni Widowati
Nama Jurnal	:	AMAR (Akuntansi, Manajemen, dan Riset Akuntansi)
Volume & Nomor	:	Vol. 3, No. 2
Tahun	:	2019
Halaman	:	90–106
Penerbit	:	Program Studi Akuntansi, Universitas Muria Kudus
DOI	:	https://doi.org/10.37531/amar.v3i2.144092

2. Ringkasan Jurnal

Jurnal ini membahas penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. Fokus penelitian adalah menilai sejauh mana SAKD diterapkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan peraturan terkait lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAKD pada Dinas Kesehatan Kudus telah berjalan cukup baik, khususnya dalam hal penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan penyusunan laporan keuangan. Sistem yang digunakan telah mengikuti struktur APBD dan mekanisme pelaporan standar pemerintah. Namun, jurnal juga mengidentifikasi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi pemerintahan, kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi keuangan daerah, serta keterlambatan proses penyusunan laporan akibat faktor internal organisasi.

Secara umum, penelitian menegaskan bahwa implementasi SAKD berpengaruh pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meskipun tetap memerlukan peningkatan kapasitas SDM, pelatihan yang berkelanjutan, dan penguatan sistem informasi keuangan daerah.

3. Analisis

Menurut kelompok kami, jurnal ini memberikan gambaran nyata penerapan SAKD di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dengan pendekatan kualitatif yang tepat dan mudah dipahami. Pembahasannya jelas, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan keuangan, serta menunjukkan kaitan SAKD dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Namun, jurnal ini belum didukung data kuantitatif dan rekomendasi yang diberikan masih bersifat umum. Meski demikian, jurnal ini tetap bermanfaat sebagai referensi untuk memahami praktik akuntansi pemerintahan dan penelitian selanjutnya.

1. Identitas Jurnal

Judul	:	Enhancing Accountability and Transparency in the Public Sector: A Comprehensive Review of Public Sector Accounting Practices
Penulis	:	Mekar Meilisa Amalia
Nama Jurnal	:	Journal Homepage
Volume & Nomor	:	Vol. 1, No. 3
Tahun	:	2023
Halaman	:	160-168
Penerbit	:	The Es Accounting and Finance (ESAF)
DOI	:	10.58812/esaf.v1.i03

2. Ringkasan Jurnal

Jurnal ini bertujuan untuk memberikan tinjauan komprehensif mengenai praktik akuntansi sektor publik dan kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas serta transparansi. Penelitian menggunakan analisis bibliometrik dengan bantuan perangkat lunak VOSviewer, yang memungkinkan penulis memetakan pola kolaborasi penulis, keterkaitan tema penelitian, keyword dominan, serta publikasi paling berpengaruh di bidang akuntansi sektor publik.

Hasil analisis mengungkap enam kluster penelitian utama:

- 1) Innovation & Transparency – menyoroti perubahan akuntansi, kinerja publik, dan transparansi.
- 2) Accounting Reform & Accrual Accounting – membahas transformasi dari basis kas ke basis akrual.
- 3) Forensic Accounting & Internal Audit – menekankan peran audit internal dan akuntansi forensik dalam pencegahan fraud.
- 4) Efficiency & Information Systems – mengulas efisiensi dan penggunaan sistem informasi akuntansi publik.
- 5) Corruption & Public Sector Auditing – menyoroti peranan audit dalam memerangi korupsi sektor publik.
- 6) Private Sector Accounting – membahas kemungkinan adopsi praktik sektor privat dalam sektor publik.

Analisis kata kunci menunjukkan bahwa istilah seperti “accountant”, “public sector reform”, dan “performance” paling sering muncul, yang berarti ketiganya menjadi fokus penting dalam literatur. Sebaliknya, kata kunci seperti “transparency” dan “information systems” muncul lebih sedikit, menandakan adanya ruang penelitian lebih lanjut pada aspek tersebut.

3. Analisis Jurnal

Menurut kelompok kami, jurnal ini memiliki kualitas akademik yang sangat baik karena menggunakan pendekatan bibliometrik terhadap 840 artikel internasional, sehingga mampu menggambarkan perkembangan riset akuntansi sektor publik secara komprehensif selama lima dekade. Analisis kluster dan visualisasi VOSviewer membantu memperjelas keterkaitan tema utama seperti akuntabilitas, transparansi, reformasi akuntansi, dan audit, serta bermanfaat untuk mengidentifikasi tren penelitian. Namun, karena bersifat bibliometrik, jurnal ini tidak menyajikan data empiris praktik lapangan dan pembahasan kluster masih deskriptif, serta minim konteks negara berkembang seperti Indonesia. Meski demikian, jurnal ini menegaskan peran penting akuntansi sektor publik dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas.

LAPORAN KEUANGAN

1. Identitas Laporan Keuangan

Entitas Pelaporan	:	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Tahun Anggaran	:	2023
Jenis Laporan	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Periode Pelaporan	:	1 Januari – 31 Desember 2023
Sifat Laporan	:	Konsolidasian (gabungan seluruh perangkat daerah dan PPKD)
Web	:	https://lampungbaratkab.go.id/home/wp-content/uploads/2024/08/Laporan-Keuangan-2023-Lampungbaratkab.go.id.pdf

2. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 disusun dan disajikan sesuai dengan:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

3. Komponen Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

4. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi yang transparan dan akuntabel terkait pengelolaan keuangan daerah
- b. Menilai kinerja keuangan pemerintah daerah selama satu periode anggaran
- c. Menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah, DPRD, dan masyarakat
- d. Memenuhi kewajiban pertanggungjawaban atas penggunaan APBD sesuai peraturan perundang-undangan

5. Ringkasan Isi Laporan Keuangan

- a. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)** menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja daerah selama tahun 2023, yang menghasilkan surplus/defisit dan SILPA sebagai indikator kinerja pengelolaan anggaran.
- b. **Laporan Perubahan SAL** menggambarkan perubahan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya dan penggunaannya dalam pembiayaan tahun berjalan.
- c. **Neraca** menyajikan posisi keuangan pemerintah daerah yang mencerminkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir tahun anggaran.
- d. **Laporan Operasional (LO)** menunjukkan kinerja ekonomi daerah melalui pendapatan dan beban operasional selama tahun 2023.
- e. **Laporan Arus Kas** memberikan informasi mengenai arus masuk dan keluar kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
- f. **Laporan Perubahan Ekuitas** menjelaskan kenaikan atau penurunan ekuitas sebagai dampak dari surplus operasional dan koreksi lainnya.
- g. **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)** berisi penjelasan rinci atas setiap laporan serta kebijakan akuntansi yang digunakan untuk memudahkan pemahaman pengguna laporan.